

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan kondisi perekonomian membuat persaingan di dunia usaha semakin ketat. Perusahaan akan berusaha mempertahankan eksistensi perusahaannya dengan berbagai cara untuk menarik minat investor. Salah satu yang dipertimbangkan investor adalah laporan keuangan, yang bertujuan memberi informasi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu perusahaan yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk menarik investor banyak perusahaan yang laporan keuangannya belum mencerminkan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan terlihat baik dan menjanjikan. Investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya jika suatu perusahaan memiliki tolak ukur yang dapat dilihat dalam laporan keuangan tahunan suatu perusahaan (Agustina dan Muttaqin, 2018). Laporan keuangan yang sehat seharusnya tidak ada unsur kecurangan di dalamnya tetapi masih banyak perusahaan yang melakukan penyimpangan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya.

Accounting Irregularities adalah istilah akuntansi dalam praktik yang tidak sesuai dengan hukum, praktik, dan aturan normal profesi akuntansi, yang disengaja untuk menipu atau menipu. Ini terdiri dari salah saji jumlah yang disengaja dan informasi lain dalam laporan keuangan atau menghilangkan informasi yang perlu diungkapkan. Fenomena tersebut telah mengorbankan perusahaan terkemuka termasuk Enron, Tyco, WorldCom dan Health South, yang mengguncang

kepercayaan investor. Masalah penyimpangan akuntansi dapat terjadi dimanapun termasuk pasar yang sedang berkembang (Rahmawati dan Kassim, 2020).

Di Indonesia kasus-kasus penyimpangan akuntansi yang terjadi seperti pada PT Indosat Tbk dan PT Garuda Indonesia Tbk yang merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia pada tahun 2019. Kasus-kasus penyimpangan akuntansi ini memberikan bukti bahwa skandal akuntansi masih bertahan di Indonesia (Soepriyanto et al., 2020). PT Garuda Indonesia Tbk yang merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia, menghadapi skandal akuntansi yang melibatkan praktik manipulasi laporan keuangan. Kasus ini melibatkan penggelembungan biaya perawatan pesawat dan pemalsuan dokumen terkait. Penyelidikan dan tindakan lanjutan terhadap kasus ini berlanjut hingga tahun 2021.

Accounting irregularities berkaitan erat dengan laporan keuangan yang memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, seharusnya terhindar dari praktik penyimpangan akuntansi yang praktiknya agresif dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan (Juliawaty dan Astuti, 2019). Kinerja keuangan merupakan hal yang sangat diperhatikan, tetapi saat ini investor juga perlu memperhatikan keberlanjutan usaha dimasa mendatang, yaitu dengan memperhatikan kinerja non keuangan perusahaan yang salah satunya adalah kinerja ESG. Di bulan maret 2020, 3826 lembaga di seluruh dunia telah bergabung dengan Prinsip Investasi Bertanggung Jawab dan mempertimbangkan isu-isu ESG selama proses pengambilan keputusan, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan dibanding dengan tahun 2010 yang hanya sebanyak 734 lembaga. Di Indonesia juga terjadi peningkatan pengungkapan ESG. Hal ini disebabkan, karena saat ini dunia menghadapi masalah yang cukup serius

yaitu kerusakan lingkungan. Beberapa penyebab dari kerusakan lingkungan diantaranya, pemanasan global akibat dari efek rumah kaca, epidemi yang timbul dikarenakan pembuangan limbah pabrik, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan.

Environmental, Social and Governance (ESG) adalah suatu konsep yang mengutamakan kegiatan bisnis yang berkelanjutan yang terdiri dari tiga kriteria utama yaitu *environmental* (lingkungan), *social* (sosial), dan *governance* (tata kelola perusahaan). *Environmental* memberikan gambaran bagaimana peran perusahaan dalam mengurangi dampak buruk pada lingkungan; *social* melihat bagaimana perusahaan menjalin dan mengelola hubungan dengan sekitar; *governance* melihat bagaimana suatu perusahaan mengatur dan menerapkan kebijakan tata kelola dengan baik (Barman, 2018). Berbeda dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk melakukan berbagai hal dan memastikan bahwa bisnis perusahaan berkelanjutan, *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan tiga kategori yang perlu menjadi fokus bisnis untuk memastikan keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan konsep yang luas, dan sulit diukur, ESG berfungsi sebagai ukuran kuantitatif spesifik dari keberlanjutan perusahaan dan kinerja sosial perusahaan, sehingga memungkinkan seseorang untuk lebih memahami dampak upaya tanggung jawab sosial terhadap hasil terukur dari keuangan dan operasional perusahaan (Zumente dan Bistрова, 2021).

Perusahaan mendapatkan *ESG score* ketika perusahaan melakukan pengungkapan ESG. Banyak perusahaan dalam pengungkapan ESG menjadikan standar GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan. Pada penelitian ini

menggunakan indeks penilaian kinerja ESG yang dikeluarkan oleh *Revinitif Eikon*. Indeks penilaian kinerja ESG terdiri dari tiga pilar yaitu, *ESG Environmental Score*, *ESG Social Score*, dan *ESG Governance Score*. Indeks ESG yang dikeluarkan oleh *Revinitif Eikon* dibuat untuk dapat secara transparan dan objektif mengukur serta menilai kinerja keberlanjutan perusahaan terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Indeks ESG yang dikeluarkan *Revinitif Eikon* menjadikan standar GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai pedoman, meskipun begitu indeks ESG tidak sama dengan GRI.

Di Indonesia penerbitan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) telah menjadi tren yang ditandai dengan banyaknya penghargaan tahunan atas *sustainability report*, seperti *Indonesia Corporate Social Responsibility Award (ICSRA)* dan *Indonesia's Best Corporate Social Initiatives*. Munculnya tren keberlanjutan ini, menjadi tuntutan bagi pemangku kepentingan yang direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 (Pasal 74 ayat 1a) tentang *Perseroan Terbatas* yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau terkait sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Setelah itu, Undang – Undang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan No.32 Tahun 2009* menetapkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Peraturan- peraturan itu ditetapkan bagi perusahaan di Indonesia yang dituntut dalam melindungi lingkungan, menganggarkan biaya pemeliharaan lingkungan, dan mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam praktiknya, hanya beberapa perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan sukarela, dengan menggunakan pedoman GRI (*Global Reporting*

Investment). Situasi ini menyebabkan pemerintah Indonesia menerbitkan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang “Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik” yang di dalamnya terdapat ketentuan umum, penerapan keuangan berkelanjutan, pemberian insentif, penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan, pelaporan dan publikasi, serta sanksi dan ketentuan penutup. Kewajiban ini berlaku secara bertahap berdasarkan sektornya. Pada penyedia jasa keuangan diharuskan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan dimulai sejak tahun 2019 dan beberapa sektor lainnya diwajibkan mulai tahun 2020 dan seterusnya.

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara keuangan kepada investor saja, tetapi juga bertanggung jawab secara non-keuangan kepada pemangku kepentingan yang lain. Perusahaan dalam menjalankan usahanya bergantung pada dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan mengelola hubungannya dengan para pelanggan, karyawan, investor, pemasok, masyarakat, komunitas, dan pihak lainnya. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan dianggap telah memenuhi kewajiban nonkeuangan. Sejalan dengan teori *stakeholder* teori agensi berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen yang menimbulkan masalah keagenan. Ini dapat menyebabkan asimetri informasi dimana manajer sebagai pihak agen lebih tahu dan memahami hubungan antara satu informasi dengan informasi lain, sedangkan pihak prinsipal memiliki keterbatasan akses terhadap informasi perusahaan. Pengungkapan ESG sebagai pelaporan informasi non keuangan yang baik dapat meningkatkan tingkat pemantauan terhadap aktivitas perusahaan oleh pemegang

saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan ini manajer cenderung mengurangi kecenderungan mereka untuk melakukan *accounting irregularities*.

Pengungkapan ESG merupakan hal yang sangat penting dalam melihat keberlanjutan perusahaan di masa depan. Pengungkapan ESG menekankan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang relevan. Ketika perusahaan menerapkan praktik pengungkapan yang baik dalam hal ESG, mereka juga cenderung menerapkan praktik akuntansi yang lebih transparan dan akurat. Dengan keadaan ini, hubungan antara pengungkapan ESG dan penyimpangan akuntansi harus dieksplorasi. Ditambah dengan masih banyaknya kasus *accounting irregularities* yang berarti isu ini tidak ada habisnya, serta menyiratkan bahwa studi kecurangan pelaporan keuangan dan penyimpangan akuntansi relevan dan bahkan penting untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuan et al., 2022) membahas tentang pengaruh pengungkapan ESG dan penyimpangan keuangan. Temuan pada penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pengungkapan ESG suatu perusahaan maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya penyimpangan keuangan. Berbeda dengan Prior et al., (2008) menyatakan hubungan positif dari manajemen laba dengan CSR karena ia berpendapat dalam penelitiannya bahwa eksekutif yang telah melakukan manipulasi laba lebih cenderung untuk secara aktif melakukan dan berpartisipasi dalam praktik tanggung jawab sosial, memenangkan niat baik publik dan mengurangi kepekaan mereka terhadap perubahan indikator keuangan perusahaan. Ini memperlihatkan bahwa masih perbedaan pandangan mengenai hubungan antara pengungkapan ESG dan CSR pada penyimpangan keuangan

maupun manajemen laba, dan adanya perbedaan hasil penelitian serta masih minimnya penelitian ini dilakukan terutama di Indonesia.

Pada penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh Yuan et al., (2022) dan Soepriyanto et al., (2021) mengecualikan perusahaan sektor *financial* karena struktur operasi dan keuangan yang berbeda. Mengembangkan dari penelitian sebelumnya oleh Yuan et al., (2022) menggunakan *financial irregularities* sebagai variabel dependen, penelitian ini memfokuskan pada *accounting irregularities* yang diukur menggunakan Beneish M-Score. Dalam mengukur *accounting irregularities*, digunakan Beneish M-Score yang dihasilkan dari mengolah data informasi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan bukti empiris terkait adanya hubungan antara pengungkapan *Environmental, Social and Governance (ESG)* dan *Accounting Irregularities*. Penelitian ini juga menggunakan data dan informasi yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan informasi melalui skor ESG oleh Revinitif Eikon Thomson Reuters.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan variabel independen yaitu pengungkapan ESG, pengungkapan lingkungan, pengungkapan sosial, dan pengungkapan tata kelola perusahaan, dengan variabel kontrol (umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas) serta menggunakan *accounting irregularities* sebagai variabel dependen. Maka peneliti akan meneliti dengan judul “Pengaruh Pengungkapan *Environmental, Social, Governance (ESG)* terhadap *Accounting Irregularities* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan *Environmental*, *Social* dan *Governance* berpengaruh terhadap *accounting irregularities* pada perusahaan?
2. Apakah pengungkapan *Environmental* berpengaruh terhadap *accounting irregularities* pada perusahaan?
3. Apakah pengungkapan *Social* berpengaruh terhadap *accounting irregularities* pada perusahaan?
4. Apakah pengungkapan *Governance* berpengaruh terhadap *accounting irregularities* pada perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengungkapan *Environmental*, *Social* dan *Governance* terhadap *accounting irregularities* pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pengungkapan *Environmental* terhadap *accounting irregularities* pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pengungkapan *Social* terhadap *accounting irregularities* pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh pengungkapan *Governance* terhadap *accounting irregularities* pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terkait pengaruh pengungkapan *Environmental, Social and Governance* (ESG) terhadap *accounting irregularities*.
- b. Merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dan mendorong dan memberi masukan pada pemerintah terutama dalam pembuatan aturan/kebijakan tentang pentingnya pengungkapan informasi non keuangan perusahaan, yang dalam hal ini adalah pengungkapan ESG.

3. Bagi Perusahaan terkait

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan dalam pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dengan melakukan pengungkapan ESG, maka akan dapat meningkatkan transparansi perusahaan dan mengurangi masalah asimetri informasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur, bahan rujukan, pembanding, dan bahan pengembangan dalam penelitian lebih lanjut yang

berkaitan dengan pengungkapan *Environmental, Social and Governance* (ESG) terhadap *accounting irregularities* pada perusahaan.

5. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan agar menambah pemahaman dan memperluas wawasan tentang *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan *accounting irregularities* pada perusahaan yang terkait dengan pembaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi konsep dan teori terkait penelitian, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan yaitu terdiri dari jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran dari masing-masing variabel, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi dari objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dari pengujian penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran serta hasil penelitian.

